



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN  
SOP/UPM/DJBM-54**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



---

---

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
4.1. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	2
4.2. Aplikasi KRISNA	2
4.3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	2
4.4. Program	2
4.5. Kegiatan	2
4.6. Pagu Indikatif	3
4.7. Pagu Anggaran K/L	3
4.8. Angka Dasar ( <i>Base Line</i> )	3
4.9. Inisiatif Baru	3
4.10. Kerangka Pengeluaran Janghka Menengah (KPJM)	3
4.11. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	3
4.12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	4
4.13. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	4
4.14. Indikator Kinerja Program (IKP)	4
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	4
5.1. Ketentuan Umum	4
5.1.1. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	4
5.1.2. Syarat Penyusunan Renja	4
5.1.3. Informasi Kinerja Dalam Renja	5
5.1.4. Program dan Pengalokasian Anggaran	5

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.5.	Urutan Prioritas Pendanaan	5
5.1.6.	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	6
5.1.7.	Telaah Kesesuaian Terhadap Renstra	6
5.1.8.	Menu Aplikasi KRISNA	6
5.1.9.	Tujuan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg)	7
5.2.	Rincian Prosedur	8
1.	Mengumpulkan Data dan Informasi	8
2.	Menyusun Usulan Program	8
3.	Kompilasi Usulan Program Ditingkat Subdit/Balai	8
4.	Rapat Koordinasi Usulan Program	8
5.	Kompilasi Usulan Program Ditingkat Direktorat	8
6.	Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional (Pra konreg)	8
7.	Pelaksanaan Konsultasi Regional (konreg)	9
8.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	9
6.	Kondisi Khusus	9
7.	Bagan Alir	10
8.	Bukti Kerja	11
9.	Lampiran	11

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-54	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat